PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
Jalan Setiabudi Nomor 201 A Semarang Kode Pos 50263
Telepon 024-7473066 Faksimile 024-7473701 Laman http://bpsdmd.jatengprov.go.id
Surat Elektronik bpsdmd@jatengprov.go.id

Semarang, 20 Oktober 2025

Nomor : 800.2.4.2/423/BPSDMD/2025

Sifat : Segera
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Hal : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

Yth. TERLAMPIR
di
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan program pengembangan kompetensi bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI) bekerjasama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan **Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025** yang terjadwal pada tanggal **25 – 28 Nopember 2025** menggunakan metode *full* e-*learning*, dengan ketentuan pelaksanaan sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan pentingnya kegiatan dimaksud, mengharap kesediaannya untuk menugaskan dan mengirimkan peserta sesuai dengan persyaratan terlampir. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr. Prima Mahardika Putra (HP/WA 0857-1280-2100).

Demikian untuk menjadikan maklum, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Jawa Tengah

Dr. Uswatun Hasanah, S.Pd, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 197607302001122003

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
Surat Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 20 Oktober 2025
Nomor : 800.2.4.2/423/BPSDMD/2025
Hal : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

KEPADA YTH.

1. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH;
2. KEPALA BIRO ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/ JASA;
3. KEPALA BIRO HUKUM;
4. KEPALA BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM;
5. KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT;
6. KEPALA BIRO ORGANISASI;
7. KEPALA BIRO PEMERINTAHAN, OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA;
8. KEPALA BIRO PEREKONOMIAN;
9. KEPALA BIRO UMUM;
10. INSPEKTUR;
11. SEKRETARIS DPRD;
12. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH;
13. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK;
14. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH;
15. KEPALA BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH;
16. KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH;
17. KEPALA BADAN PENGHUBUNG;
18. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;
19. KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH;
20. KEPALA PELAKSANA HARIAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH;
21. KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL;
22. KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN;
23. KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN;
24. KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA;
25. KEPALA DINAS KESEHATAN;
26. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN;
27. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA;
28. KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH;
29. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
30. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN CIPTA KARYA;
31. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG;
32. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL;
33. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA;
34. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU;
35. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN;
36. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN;
37. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN;
38. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN;
39. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN;
40. KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN;
41. KEPALA DINAS SOSIAL;
42. KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI;
43. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA;
44. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH AMINO GONDOHUTOMO;
45. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. ARIF ZAINUDIN;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

46. DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA DAERAH Dr. RM. SOEDJARWADI;
47. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ADHYATMA, MPH;
48. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. MOEWARDI;
49. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. REHATTA;
50. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. Dr. MARGONO SOEKARJO**.**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran II
Surat Kepala BPSDMD Provinsi Jawa Tengah
Tanggal : 20 Oktober 2025
Nomor : 800.2.4.2/423/BPSDMD/2025
Hal : Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025

KETENTUAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

1. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara, ideologi bangsa, dan pandangan hidup masyarakat Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi dinamika globalisasi, kemajuan teknologi informasi, serta perubahan sosial yang begitu cepat, nilai-nilai Pancasila kerap mengalami tantangan dan pergeseran dalam implementasinya di berbagai lapisan masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai pelaksana kebijakan publik dituntut tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara konseptual, tetapi juga mampu menginternalisasikannya dalam setiap tindakan, kebijakan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian, berbagai survei dan fenomena sosial menunjukkan bahwa pemahaman serta pengamalan nilai-nilai Pancasila di kalangan aparatur masih perlu diperkuat. Oleh karena itu, penyelenggaraan Diklat Pembinaan Ideologi Pancasila menjadi langkah strategis untuk memperkuat wawasan kebangsaan, memperdalam pemahaman ideologis, serta menumbuhkan komitmen ASN dalam menegakkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Melalui diklat ini, diharapkan terbentuk aparatur yang berintegritas, nasionalis, berjiwa gotong royong, serta mampu menjadi teladan dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kerja dan masyarakat.

2. Maksud dan Tujuan

Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) bertujuan membentuk ASN berkarakter dan berbangsa berdasarkan nilai – nilai Pancasila yang berfokus pada :

a. Pengembangan pengetahuan, disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan), dan kolaborasi dengan pihak lain berdasarkan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
b. Pengembangan pengetahuan dan disposisi (sikap, komitmen, dan keyakinan) bertindak berdasarkan nilai – nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
c. Pengembangan pengambilan keputusan, beretos kerja, dan berpartisipasi aktif dalam praktik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 dilaksanakan selama **4 (empat) hari kerja** pada tanggal **25 – 28 November 2025** dengan metode full e-*learning*, bertempat di ruang virtual BPSDMD Provinsi Jawa Tengah. Pembelajaran secara daring / online di Instansi masing-masing atau di tempat lainnya menggunakan komputer / laptop atau gawai/ *smartphone*.

4. Kurikulum Pelatihan

Jumlah kurikulum Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila (Diklat PIP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yaitu **32 JP** dengan rincian sebagai berikut :

I. Materi Dasar

1) Sejarah Kelahiran dan Perumusan Pancasila
2) Pokok-pokok Pikiran Pancasila
3) Kedudukan Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara
4) Demokrasi Pancasila
5) Sistem Ekonomi Pancasila
6) Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila

II. Materi Umum

1) Muatan Umum Pancasila

III. Materi Pengayaan

1) Pengayaan

5. Peserta

a. Target jumlah peserta yaitu **40 (empat puluh) orang**.
b. **ASN Kualifikasi Pratama** (Pejabat Fungsional Ahli Pertama / Pejabat Fungsional Terampil / Pejabat Pelaksana) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
c. Sanggup dan mampu menjadi agen penggerak untuk menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila di instansinya.

6. Pembiayaan

Peserta pelatihan tidak dipungut biaya. Seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan ini dibebankan pada DIPA BPIP RI Tahun Anggaran 2025.

7. Pendaftaran Peserta

Pendaftaran Online peserta maksimal **Kamis, 23 Oktober 2025 Pukul 15.00 WIB** dengan mengisi biodata peserta dan menyiapkan persyaratan dokumen yang meliputi :

a. Surat Perintah Tugas
b. Pas Foto (background merah, atasan putih, berdasi kupu untuk perempuan, mengenakan papan nama)

ke website SIMAPANSDM dengan link alamat di https://s.id/DiklatPIPJtg2025.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).